

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirjo, Prajudi. 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fauzan, Muhammad. 2010. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Purwokerto: Stain Press.
- Hadjon, Philipus.M dkk. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesian Administrative Law*). Surabaya: Gadjah Mada University Press.
- HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan. 2016. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartono. 2021. Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Banyumas: SIP Publishing
- Kansil, C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjoro, Diana Halim. 2004. Hukum Administrasi Negara. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Kusnardi, dan Hamarllly Ibrahim.1983. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Marbun, S.F. 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Marbun, S.F dan Moh.Mahfud. 2006. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik. 2012. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Bandung: Nuansa.
- Rosidin, Utang. 2015. Otonomi daerah dan Desentralisasi. Jakarta: Pustaka Setia.

S, Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.

Siahaan, MARIHOT P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sinamo, Nomensen. 2010. Hukum Adminstrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya

Putusan Nomor : 4/Pid.C/2019/PN.Tsm.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 648/ Kep.0484/ IMB/ DPMPTSP/2019 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Jurnal

Fariied, Suparwi Femmy Silaswaty. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah. Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 2.

Hadjon, Philipus M. 1995. Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Volume 2, Nomor 4.

Sampebulu, Hariansi Panimba. 2019. Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Bali. Jurnal Mimbar Keadilan Volume 2 Nomor 2

Suharjono, Muhammad. 2014. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Volume 10, Nomor 19.

